ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG PENGANGKATAN STATUS TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 atas perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 permasalahan tentang pengangkatan tenaga honorer yaitu tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 atau Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, karena tenaga honorer tersebut dibiayai oleh non-APBN dan APBD namun mengajar di sekolah swasta dan kurang dari sisi usia. Tenaga honorer yang lulus seleksi tertulis dapat diangkat, namun bila tidak lulus masih bisa dipekerjakan di instansi terkait hingga usia 56 tahun.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik. Dunn mengatakan keberhasilan analisis pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses, yaitu proses pengkajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan proses komunikasi kebijakan. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan melakukan Analisis Kebijakan Tentang Pengangkatan Status Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskritif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling*. Unit analisis mengacu kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam melakukan perekaman data nama-nama dan jumlah tenaga honorer yang bekerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat dilihat dari faktor-faktor seperti Proses Pengkajian Kebijakan, Proses Pembuatan Kebijakan, dan Proses Komunikasi Kebijakan sebagai pendukung keberhasilan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah terealisasikan dengan baik. Peneliti berharap tujuan dan sasaran kebijakan pemerintah harus lebih terarah lagi agar tidak ada keterlambatan dalam melakukan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Tenaga Honorer , CPNS